

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI
KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)
DI KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
ISNAENI

NIM. 1323203024

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Isnaeni
NIM : 1323203024
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 7 Agustus 2018

Yang menyatakan



Isnaeni
NIM. 1323203024



IAIN PURWOKERTO

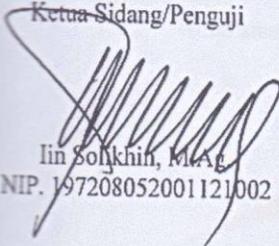
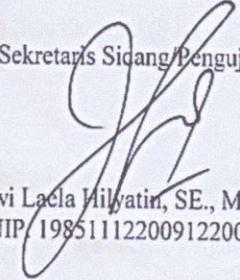
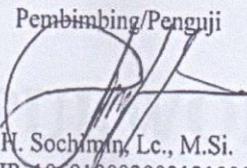
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI
 KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)
 DI KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS**

yang disusun oleh Saudari **Isnaeni NIM. 1323203024** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at**, tanggal **Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

<p>Ketua Sidang/Penguji</p>  <p>Lin Solikhin, M.Ag. NIP. 197208052001121002</p>	<p>Sekretaris Sidang/Penguji</p>  <p>Dewi Laela Hilvatin, SE., M.S.I. NIP. 198511122009122007</p>
<p>Pembimbing/Penguji</p>  <p>H. Sochimn, Lc., M.Si. NIP. 196910092003121001</p>	
<p>Purwokerto, Agustus 2018</p> <p>Mengetahui/Mengesahkan Dekan</p>  <p>Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. NIP. 19680403 1994031004</p>	



NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Isnaeni, NIM. 1323203024 yang berjudul :

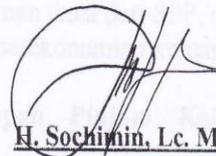
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN
SIMPAN PINJAM KELOMOK PEREMPUAN (SPP)
DI KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 7 Agustus 2018

Pembimbing



H. Sochim, Lc. M.Si

NIP. 196910092003121001

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI
KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)
DI KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS**

**ISNAENI
1323203024**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi pembahasan setiap tahunnya di Indonesia. Ada berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan salah satunya melalui program pemberdayaan. Program pemberdayaan penting dilakukan terutama kepada kaum perempuan. Dalam teori Karls pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti kekuasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindakan transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yang menggambarkan tentang suatu keadaan. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) ada suatu pemberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya kaum perempuan di Kecamatan Purwojati, Banyumas. Perubahan yang dapat dirasakan oleh pemanfaat kegiatan SPP yakni kaum perempuan yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki pekerjaan dan mayoritas membuka usaha dagang dari hasil pinjaman dana dari SPP, dan kini mereka mampu lebih produktif serta dapat membantu perekonomian keluarga.

Kata kunci : Pemberdayaan Perempuan, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

**EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH
SAVING AND LOAN ACTIVITIES OF WOMEN'S GROUPS (SPP)
IN THE DISTRICT PURWOJATI BANYUMAS REGENCY**

**ISNAENI
1323203024**

ABSTRACT

Poverty is one of the problem that becomes the discussion every year in Indonesia. There are various government programs that have the goal of tackling the problem of poverty, one of which is the empowerment. Empowerment programs are important to be carried out especially for women. In Karls theory, women's empowerment is a process of awareness and capacity building for greater participation such as power, supervision, and decision making as well as transformation actions that lead to the realization of greater equality between women and men.

This research is done by qualitative approach with descriptive character describing about a state. Lokal research conducted in Purwojati subdistrict, Banyumas. Techniques data analysis is done by data reduction, data presentation then drawing conclusion.

The result showed that after the women's saving and loan activities (SPP) there was an empowerment felt by the users of SPP activities, namely women who previously did not have a job now had job and the majority of them opened trading businesses from SPP loans, and now they were able to productive and can help the family economy.

Keywords: Women's Empowerment, Women's Group Saving Loan (SPP)

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

“Jalani, Nikmati, Syukuri”

(Penulis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini didedikasikan kepada kedua orang tuaku
Bapak Hadi Suwarjo dan Mama Rukiyah
dan saudara-saudaraku Mba Yuni dan Mba Jumi.
Apa yang mereka telah berikan melebihi dari apa yang aku inginkan*

Kupersembahkan goresan tanganku bagi ilmu pengetahuan Indonesia



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُوِّلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌ِـو ◌ِـوْ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َـا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas

	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas
---	---------------------------	----------	------------------------

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Munjin, M. Pd. I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M. Pd. I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Drs. Fathul Aminudin Aziz, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto.
7. H. Sochimim, Lc. M.S.I., selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf administrasi IAIN Purwokerto.
9. Bapak Ibu anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati.

10. Kedua orang tua, bapak tercinta Hadi Suwarjo dan mamah tersayang Rukiyah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
11. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dan bantuannya.
12. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ekonomi.

Purwokerto, 7 Agustus 2018

Penulis



Isnaeni

NIM. 1323203024

IAIN PU

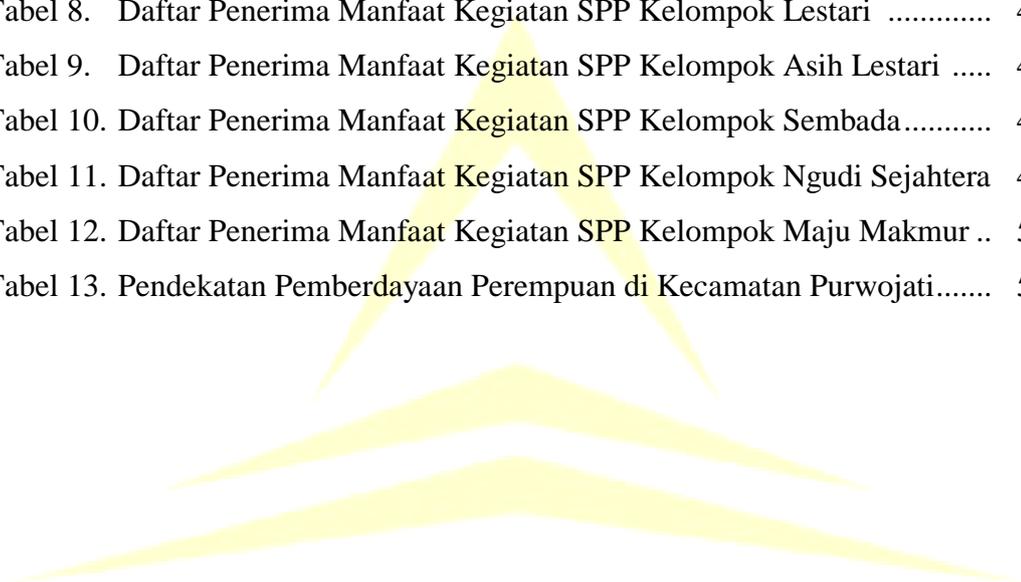
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemberdayaan Perempuan	15
1. Konsep Pemberdayaan Perempuan	15
2. Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi	19
3. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan	23
4. Indikator Keberhasilan pemberdayaan perempuan	26
B. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	27
1. Tujuan SPP	27
2. Ketentuan Dasar SPP	27

3. Ketentuan Pendanaan BLM	27
4. Mekanisme Pengelolaan	28
C. Landasan Teologis	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisi Data	40
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Profil Kecamatan Purwojati	42
2. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	44
B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan SPP	49
1. Konsep Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	49
2. Program Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	52
3. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	59
4. Indikator Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemanfaatan Dana PNPM-Mpd Kecamatan Purwojati	3
Tabel 2. Jumlah Dana SPP Kecamatan Purwojati	4
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4. PendekatanPemberdayaan Model GAD	23
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kecamatan Purwojati Menurut Desa	38
Tabel 6. Luas Kecamatan Menurut Desa	39
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan	39
Tabel 8. Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Lestari	47
Tabel 9. Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Asih Lestari	47
Tabel 10. Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Sembada.....	48
Tabel 11. Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Ngudi Sejahtera	49
Tabel 12. Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Maju Makmur ..	50
Tabel 13. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Purwojati.....	52



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 13 Surat Keterangan Telah Penelitian
- Lampiran 14 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 15 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 16 Sertifikat-sertifikat
- Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi pembahasan setiap tahunnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan kondisi dimana kualitas hidup yang rendah terhadap sumber-sumber daya yang ada.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan jumlah penduduk miskin per September 2016.² Sedangkan tingkat kemiskinan (presentase penduduk miskin dari seluruh penduduk) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 mencapai 73,23%. Merujuk data tersebut merupakan data terakhir yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas menduduki peringkat ke 28 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 281.414 orang.³

Indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menggunakan indikator kemiskinan rumah tangga.⁴ Dalam kehidupan nyata seringkali perempuan kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga, sehingga perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan bergantung dengan hasil pendapatan suami. Peran perempuan dalam rumah tangga menyebabkan perempuan dianggap sebagai penerima pasif pembangunan. Berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah kembali, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia 51,7% dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 88,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih

¹Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.25.

²Jumlah Penduduk Miskin Naik, Program Pemerintah Harus Dievaluasi <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/164100926/jumlah-penduduk-miskin-naik-program-pemerintah-harus-dievaluasi> (diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 21.00)

³Radar Banyumas “Peringkat 28 Jumlah Penduduk Miskin di Jateng”, <http://radarbanyumas.co.id>(diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 21.55 WIB).

⁴Ana Zahrotun Nihayah, *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Economic : Journal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.5.No. 2).

rendah dibanding tingkat partisipasi kerja laki-laki.⁵Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.Keberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi adalah satu indikator meningkatnya kesejahteraan.Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja diluar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat.⁶

Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam sangat memahami kebutuhan penganutnya, tidak terkecuali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷Ada berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk melakukan intervensi bagi penanggulangan masalah kemiskinan salah satunya melalui program pemberdayanyaitu Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.Kebijakannya harus berlaku menyeluruh tanpa berpihak pada suatu golongan tertentu, baik itu golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah.Hal itu bertujuan supaya tidak ada suatu golongan yang merasa tidak diperlakukan secara adil. Allah SWT jugatelah memberikan perintah kepada setiap orang untuk berlaku adil yang disebutkan dalam firmanNya yaitu surat al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 وَلَا تَعْدُوا عَلَيْهِمْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu (sebagai) penegak keadilan karena Allah. (yaitu ketika kamu) menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku

⁵Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1993), hlm. 5.

⁶Retno Endah Supeni, *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi deskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)*, (Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011).

⁷Sochimin, *Kewirausahaan Teori Aplikatif dan Praktik*, (Yogyakarta: Cinta Buku, 2017), hlm. 18.

*tidak adil, berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah.*⁸

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat dengan bentuk kegiatannya yaitu dengan memberikan pinjaman dana sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.⁹ Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang sudah berjalan dari tahun 2007 ini merupakan kegiatan utama dari PNPM Mandiri dimana PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan terbesar di Indonesia. Berikut adalah tabel mengenai pemanfaatan dana PNPM Mandiri di Kecamatan Purwojati:

Tabel 1
Pemanfaatan Dana PNPM-MPd Kecamatan Purwojati
Kabupaten Banyumas

NO	TAHUN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	TOTAL
1	2012	Prasarana Umum	Rp. 652.056.200	Rp. 900.000.000
		Sarana Kesehatan	Rp. 11.515.500	
		Prasarana Kesehatan	Rp. 12.324.100	
		SPP	Rp. 224.104.200	
2	2013	Prasarana Umum	Rp. 750.000.000	Rp. 1.000.000.000
		SPP	Rp. 250.000.000	
3	2014	Prasarana Umum	Rp. 576.772.700	Rp. 1.000.000.000
		Prasarana Pendidikan	Rp. 173.227.300	
		SPP	Rp. 250.000.000	

⁸ Imam Ghazali Masykur dkk., Al-Quran (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 107.

⁹ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2007), hlm. 58.

(Sumber: Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Purwojati)

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan¹⁰ Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu alternatif pemecah permasalahan kemiskinan di pedesaan yaitu memberikan permodalan bagi kelompok perempuan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari pada bank, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dengan mengembangkan usaha yang dikelola.

Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang melaksanakan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), dengan mayoritas masyarakatnya yang bekerja sebagai petani dinilai penghasilannya kurang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu masyarakat Kecamatan Purwojati mengandalkan kegiatan SPP untuk digunakan sebagai modal usaha mikro seperti berdagang, terlebih lagi kaum perempuan atau ibu-ibu. Berdagang dilakukan guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹¹ Akan tetapi tidak sedikit juga yang memanfaatkan dana SPP digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membayar kebutuhan anak sekolah, namun ada beberapa usaha mikro yang dilakukan oleh masyarakat berkembang dari bantuan modal SPP.¹²

Tabel 2
Jumlah Dana SPP Kecamatan Purwojati

NO	TAHUN	NAMA DESA	DANA SPP	JUMLAH KELOMPOK	TOTAL
----	-------	-----------	----------	-----------------	-------

¹⁰Gianina Amelinda Rantung, *Efektifitas Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal Ekonomi, 2014).

¹¹Wawancara dengan Ibu Carsini selaku ketua kelompok SPP PNPM Mandiri Desa Karangtalun Lor, pada tanggal 16 November 2017 pukul 14.00 WIB.

¹²Wawancara dengan Ibu Endang anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.45 WIB.

1	2012	Karangtalun Kidul	Rp. 25.263.000	12	Rp. 224.104.200
		Gerduren	Rp. 27.894.600	19	
		Kaliurip	Rp. 20.000.000	10	
		Karangtalun Lor	Rp. 21.052.500	7	
		Kaliputih	Rp. 38.947.300	11	
		Karangmangu	Rp. 34.736.800	12	
		Klapasawit	Rp. 9.894.600	5	
		Kalitapen	Rp. 23.157.800	9	
		Purwojati	Rp. 15.789.300	10	
		Kaliwangi	Rp. 7.368.300	5	
2	2013	Karangtalun Kidul	Rp. 34.736.800	11	Rp. 250.000.000
		Gerduren	Rp. 31.579.000	14	
		Kaliurip	Rp. 15.789.500	10	
		Kaliputih	Rp. 40.000.000	11	
		Karangmangu	Rp. 16.315.800	5	
		Kalitapen	Rp. 36.842.100	11	
		Purwojati	Rp. 60.000.000	9	
Kaliwangi	Rp. 14.736.800	6			
3	2014	Karangmangu	Rp. 37.894.800	7	Rp. 250.000.000
		Gerduren	Rp. 32.631.500	7	
		Kaliputih	Rp. 26.315.800	5	
		Kalitapen	Rp. 32.105.300	10	
		Karangtalun Kidul	Rp. 20.000.000	5	
		Purwojati	Rp. 63.157.900	10	
Karangtalun Lor	Rp. 37.894.700	8			

(Sumber: Surat Penetapan Camat (SPC) Camat Purwojati)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kegiatan SPP berjalan di Kecamatan Purwojati dan digulirkan pada tiap-tiap kelompok yang ada pada tiap-tiap desa di Kecamatan Purwojati. Menurut salah satu anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), Kecamatan Purwojati merupakan salah satu kecamatan yang dana surplus dari SPP digunakan untuk dana bantuan sosial guna pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hal tersebut menjadi keunggulan dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di

Kecamatan Purwojati, karena tidak semua kecamatan melaksanakan pembangunan RTLH dari dana SPP.¹³

Untuk melihat pencapaian pelaksanaan kegiatan SPP diperlukan kajian-kajian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penilaian keberhasilan suatu kelompok dalam mengelola sesuatu yang telah dicapai. Kegiatan SPP dapat berjalan dengan baik apabila seluruh unsur-unsur yang terlibat dapat bekerja secara efektif. Pada kenyataannya, ditinjau dari aspek pengelolaan kegiatan tidak semua simpan pinjam kelompok perempuan di daerah tersebut dapat mengelola kegiatan mereka masing-masing sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Tidak sesuainya tujuan dan hasil yang dicapai merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat proses pengembalian modal. Hal ini yang dapat menyebabkan proses perguliran dana kepada kelompok-kelompok lain menjadi tidak lancar.

Berdasarkan beberapa latar belakang di atas yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian.

Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan

¹³Wawancara dengan Ibu Endang anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.45 WIB.

atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan perempuan menurut Karls yang dikutip Syafi'i Ma'arif adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti kekuasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindakan transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.¹⁵

Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan adalah pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) terhadap masyarakat di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

2. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.¹⁶

Dalam penelitian ini yang dimaksud Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh kelompok SPP di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

¹⁴Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hlm 7.

¹⁵Syafi'I Maarif, *Pembangunan dalam Perspektif Gender* (Malang: UMM Press, 2013), hlm. 189.

¹⁶Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2007), hlm. 58.

Berdasarkan definisi operasional diatas, maka maksud judul penelitian ini adalah penelitian tentang pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Mengingat sangat luasnya pengetahuan dalam peningkatan ekonomi, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti dengan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud yang membaca laporan dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian kita sesungguhnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk masyarakat pelaku ekonomi pedesaan, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sehingga akan berdampak positif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

- c. Untuk civitas akademika, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan atau penelitian yang terkait, terutama yang mempunyai fokus terhadap pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.¹⁷ Tema judul penelitian sesungguhnya telah banyak dibahas, baik dalam bentuk buku, skripsi terdahulu, jurnal penelitian, maupun karya-karya lainnya.

Dalam buku yang berjudul *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi* karya Prijono, S. Onny dan Pranaka berpendapat bahwa pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.¹⁸

Menurut Mardikanto dalam buku yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua individu, kelompok maupun kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Kelsey dan Hearne mengemukakan bahwa falsafah pemberdayaan adalah bekerja bersama untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help them-selves*).¹⁹

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta 2000), hlm.75.

¹⁸Prijono, S. Onny dan Pranaka, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 55.

¹⁹Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat...* ,hlm. 101.

Menurut Aprilia, Krisna, Prima dan Totok dalam buku yang berjudul *Pembangunan Berbasis Masyarakat* mengungkapkan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.²⁰

Dalam bukunya Zubaedi yang berjudul *Pengembangan Masyarakat* menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun segi sosial. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kaitannya ini, maka perlu ada kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung, dan memberikan akses bagi setiap pelaku.²¹

Sedangkan dalam buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan fisik, ekonomi, maupun sosial.²²

Dalam bukunya Riant Nugroho yang berjudul *Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia* mengenai program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut Riant Nugroho yaitu meliputi:

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Selama ini yang kita kenal adalah kegiatan PKK

²⁰ Aprilia Theresia, dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 93.

²¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 77.

²² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 60.

(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) serta kelompok-kelompok sosial keagamaan seperti pengajian, persekutuan doa, koperasi dan yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol.

2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melihat peran masyarakat.
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai ketrampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.²³

Penyusun juga melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan dengan masalah pemberdayaan perempuan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukkan dalam penelitian ini.

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam	Pemberdayaan perempuan dalam bidang simpan pinjam memiliki potensi untuk	Lokasi penelitian

²³ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengurus-Utamanya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm 165.

Syariah Perempuan). (Siti Hasanah, 2013). ²⁴	mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya dalam rangka meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi.	berbeda.
Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Ana Zahrotun Nihayah, 2015). ²⁵	Pemberian pinjaman simpan pinjam kelompok perempuan PNPM Mandiri pedesaan memberikan pengaruh terhadap perubahan pendapatan usaha kecil.	Lokasi penelitian berbeda dan metode penelitian yang digunakan kuantitatif.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Sosial di Kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi.(Ida Royani, 2012). ²⁶	Upaya yang dilakukan oleh BPMP untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam penelitian tersebut dilakukan melalui pembentukan kelompok dan pendampingan. Keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencapai 73% dari 6000KK. Keberhasilan secara fisik program ini adalah tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat.	Lokasi penelitian berbeda serta program yang dijalankan tidak dikhususkan untuk perempuan tetapi lebih untuk masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan.
Pemberdayaan Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi	Pemberdayaan perempuan melalui <i>Home Industry</i> Bulu Mata di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok	Penelitian lebih difokuskan pada <i>home</i>

²⁴Siti Hasanah, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*, (SAWWA-Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013).

²⁵Ana Zahrotun Nihayah, *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reducation Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Economic : Journal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.5.No. 2).

²⁶Ida Royani, skripsi "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Sosial di Kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya Kabupaten Bekasi". Malang: UIN Malang. 2012.

Islam. (Anifatus Solihah, 2016). ²⁷	Kabupaten Banyumas telah ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga dan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam.	<i>industry</i> serta dikaitkan dengan perspektif Islam dan lokasi penelitian berbeda.
Peran PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kegiatan <i>Home Industry</i> di Dusun Kaliwaru, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Putri Astini, 2011). ²⁸	Dalam penelitian ini pemberdayaan yang dilakukan untuk perempuan sudah cukup maksimal. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan membuat produk, latihan dan penyuluhan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian perempuan diadakan juga arisan, simpan pinjam, tabungan, dan jimpitan beras. Partisipasi ibu-ibu yang mengikuti kegiatan PKK cukup besar namun masih bersifat pasif dan dalam pelaksanaannya tidak semua program PKK dapat dilaksanakan.	Kegiatan yang dijalankan dan lokasi penelitian berbeda.

Dari beberapa buku dan hasil penelitian tersebut, belum secara khusus membicarakan masalah pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang sudah dilakukan, membuktikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

F. Sistematika Pembahasan

²⁷Anifatus Solihah, skripsi "Pemberdayaan Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Bulu Mata Sokawera Cilongok Banyumas)". Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

²⁸Putri Astini, skripsi "Peran PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kegiatan Home Industry di Dusun Kaliwaru, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Sistematika penyusunan skripsi merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami bagian-bagian secara lebih rinci. Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan kajian teoritis tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam membahas hasil penelitian. Adapun teori-teori tersebut terdiri dari pertama mengenai teori pemberdayaan dan kedua membahas mengenai Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi tentang penentuan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Yang kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan peneliti serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Perempuan

1. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²⁹ Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranaka, pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan kepada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.³⁰

Dari definisi pemberdayaan tersebut, pada prinsipnya pemberdayaan yaitu dalam rangka membangun potensi-potensi yang ada pada seseorang dan sekelompok orang. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan ditujukan agar klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan

²⁹Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hlm 7.

³⁰Prijono, S. Onny dan Pranaka, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 55.

mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.³¹

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur paksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhan yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang memiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup. Aspek kebutuhan, masalah dan potensi tidak nampak. Agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien/sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subyek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai-nilai, budaya dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong-royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri

³¹Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung; Alfabeta, 2013), hlm. 60.

masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.

- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah bertahan lama.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistic terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning/education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik dan juga lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keberagaman budaya oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.

- l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut mulai dari, mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.
- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi dan kemampuannya.

Pemberdayaan perempuan menurut Karls yang dikutip Syafi'i Ma'arif adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti kekuasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindakan transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.³² Dalam pemberdayaan tenaga kerja perempuan terdapat tiga konsep secara prinsip yakni:

- a. *Capacity Building* adalah membangun kemampuan perempuan,
- b. *Cultural Change* adalah perubahan-perubahan budaya yang memihak perempuan,

³² Syafi'I Ma'arif, *Pembangunan dalam Perspektif Gender* (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 189.

c. *Structural Adjustment* adalah penyesuaian terhadap structural yang berpihak kepada perempuan.³³

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

2. Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi khususnya dipedesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, ketrampilan, sedikitnya kesempatan kerja dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu, perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan rumah tangga.

Program pemberdayaan perempuan harus segera dilakukan serentak, berkesinambungan, dan melibatkan semua elemen masyarakat. Upaya pemberdayaan perempuan juga harus dilakukan secara nyata, tidak hanya bersifat slogan dan berhenti pada tingkat wacana. Untuk itu dirancang program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang antara lain bertujuan untuk:

³³*Ibid.*, hlm. 190.

- a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipan aktif (subyek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
- b. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap program pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- c. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.³⁴

Dalam pemberdayaan perempuan pedesaan terdapat beberapa faktor yang dianggap penting dalam pemberdayaan perempuan pedesaan, yaitu:

1) Peran Serta Pemerintah

Pemerintah mempunyai andil besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam suatu masyarakat pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai power untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Terutama dalam era otonomi daerah sekarang ini. Pemerintah daerah seharusnya mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, karena secara otonomi pemerintah mampu mengatur masyarakat dan keuangan sendiri.³⁵

2) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

LSM muncul karena kesadaran akan arti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan tanggungjawab pembangunan. Kedekatan LSM menjadi kekuatan sosial politik yang memungkinkan proses pembangunan berkelanjutan dalam proporsi yang seharusnya. Keberadaan LSM mampu menciptakan keserasian antara penguasa,

³⁴Syafi'I Ma'arif, *Pembangunan ...*, hlm. 164.

³⁵ Isbandi Rukminto, *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56.

pelaksana pembangunan (aparatur negara) dan LSM yang berjalan pada rel yang sama dengan visi yang berbeda untuk kepentingan bersama.³⁶

Saat ini banyak sekali LSM yang berkembang di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial. Sudah banyak peran nyata yang dilakukan LSM terutama dalam memberdayakan perempuan yang mampu menjangkau hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah. Dengan keswadayaan yang dimiliki, LSM mengembangkan kegiatan berbasis daerah atau wilayah, sehingga masing-masing wilayah yang menjadi sasaran memiliki program yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Berbeda dengan program pemerintah yang biasanya sudah berupa paket dari pusat, yang dilaksanakan merata ke semua wilayah Indonesia tanpa memperhatikan wilayah sasaran, akibatnya program pemerintah banyak yang mengalami kegagalan. Cara LSM menjadi fasilitator adalah dengan membantu rakyat mengorganisasikan diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka.

3) Pendampingan

Dalam teori yang dikemukakan Kartasamita, dalam suatu masyarakat yang miskin diperlukan pendampingan yang bertugas untuk menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat atau dalam konteks penelitian ini perempuan. Selain itu, pendampingan juga harus melakukan upaya peningkatan kualitas anggota dan pengusaha kelompok, serta peningkatan usaha anggota. Menurut Kartasamita, pendampingan yang ideal adalah yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

4) *Local Community Organization*

Kelompok masyarakat yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri adalah fasilitas yang paling efektif untuk upaya pemberdayaan masyarakat, atau dalam kasus pemberdayaan perempuan. Perempuan

³⁶ Candra Sitorus, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang", Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

yang bekerja dengan perempuan lain akan lebih berdaya dibandingkan jika ia bekerja sendiri. Penentuan lokal community organization oleh perempuan, akan meningkatkan posisi perempuan. Disamping itu, ketika mereka berkumpul mereka dapat merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga dengan kesamaan tujuan, program pemberdayaan akan lebih mudah mencapai sasaran.

5) Koperasi

Koperasi merupakan sarana penting yang dapat membantu memberdayakan perempuan, terutama dalam meningkatkan kemampuan berorganisasi dan akses dalam memperoleh pembiayaan. Dua hal tersebut penting, terutama pada perempuan pedesaan yang tidak sedikit memiliki pendidikan rendah, akan memiliki pendidikan rendah, akan memiliki kerampilan dalam hal membuat keputusan, kepemimpinan, kemandirian, serta manajemen, sehingga tidak hanya memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi, namun juga dalam hal psikologi. Selain itu, koperasi dipedesaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kemudahan akses dalam memperoleh pinjaman, membantu mengorganisir kebutuhan petani, serta menampung hasil tanman petani agar dapat dijual secara kolektif.

6) Peran Swasta

Dewasa ini di Indonesia banyak sekali program *Corporate Social Responsibility* yang bersifat *Charity* atau ditujukan untuk memberdayakan perempuan dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Swasta dinilai memiliki modal yang besar dalam memberdayakan perempuan, karena lebih *independent* dan tidak terikat pada kepentingan politik manapun. Dengan sumber dana yang cukup besar, swasta mampu memberdayakan perempuan jika program yang

dilakukan mampu memfasilitasi perempuan dengan pendampingan yang intensif dan tingkat sustanbilitas yang tinggi.³⁷

7) Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mendorong pembangunan dan mencapai kesetaraan serta keadilan. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat, tidak hanya bagi perempuan namun juga untuk laki-laki, terutama dalam menyetarakan hubungan antara keduanya. Untuk menjadi agen perubahan, perempuan harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan.³⁸ Pendidikan merupakan kunci keberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan disini bukan berarti pendidikan formal saja, namun juga pendidikan informal, seperti ketrampilan membuat kerajinan tangan, ketrampilan memasak, kemampuan berorganisasi, sehingga dengan pendidikan perempuan mempunyai bekal atau kekuatan untuk memberdayakan dirinya sendiri.

8) Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriah. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses alur tahapan program dan pengawasan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dengan bentuk materil.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan di desa, perempuan harus memiliki kesadaran untuk terlibat sendiri dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Partisipasi disini juga perempuan harus ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan karena nantinya mereka sendiri yang melakukan. Partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan

³⁷Isbandi Rukminto, *Intensif Komunitas...*, hlm. 56.

³⁸Ariefa Efaningrum, "Pendidikan dan Pemajuan Perempuan : Menuju Keadilan Gender", *Fondasia, Volume 1 Nomor 9/Tahun VII/Maret 2008*.

dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan.³⁹

3. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan

Program pemberdayaan perempuan membutuhkan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan kelompok masyarakat yang dituju. Beberapa pendekatan untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan telah digunakan. Pendekatan pertama kali adalah pendekatan kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan itu ditingkatkan, wanita dianggap sebagai objek pembangunan. Kemudian pendekatan kesamaan. Kemudian ada pendekatan anti-kemiskinan, efisiensi, dan sebagainya, yang semuanya ini dianggap tidak mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan itu sendiri. Sampai pada akhirnya muncul pendekatan mutakhir yang disebut dengan pendekatan pemberdayaan.⁴⁰

Pendekatan pemberdayaan perempuan, lahir dari ketidakpuasan terhadap pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk memperbaiki posisi perempuan dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kekuasaan tawar-menawar dalam mengubah nasibnya. Pendekatan ini meletakkan upaya penghapusan subordinasi perempuan sebagai pusat perhatian. Ini berarti bahwa kesamaan ekonomi, hak-hak resmi yang telah diskriminatif serta hak-hak reproduktif dimasukkan dalam agenda. Pendekatan ini sebenarnya lebih bersifat ideologis dan filosofis. Untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tentu saja pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi lokal perempuan dan masyarakat yang bersangkutan.⁴¹

Pendekatan pemberdayaan dikenal dengan model *Gender and Development*. Satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua

³⁹Isbandi Rukminto, *Intensif Komunitas...*, hlm. 56.

⁴⁰Pinky Saptandari, "Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan", *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Th XII, No. 2, April 1999, hlm. 33-35.

⁴¹Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengurus-Utamanya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 169.

kerja yang dilakukan perempuan seperti kerja produktif, reproduktif, privat dan publik, dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga.⁴² Pendekatan ini bertujuan memahami pembangunan bagi perempuan dalam hal kemandirian dan kekuatan internal dari diri perempuan itu sendiri. Model ini lebih mementingkan pada perkembangan organisasi perempuan yang mengarah pada tingkat kesadaran dan pendidikan rakyat.

Tabel 4
Pendekatan Pemberdayaan Model *Gender and Development* (GAD)

GAD (<i>Gender and Development</i>)	
Pendekatan	- Berusaha memberdayakan dan mentransformasi hubungan tak setara antara pria dan wanita
Fokus	- Hubungan antara pria dan wanita
Permasalahan	- Hubungan kekuatan tak setara yang menghalangi pembangunan yang layak dan partisipasi penuh perempuan
Sasaran	- Pembangunan yang layak dan berkelanjutan. - Pria dan wanita berbagi dalam pengambilan keputusan dan penguasaan.

⁴²Julia Cleves Moss, *Gender dan Pembangunan*, Alih bahasa : Hatian Silawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 209.

Strategi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan memperuntukkan kebutuhan jangka pendek yang ditentukan oleh pria dan wanita untuk meningkatkan kondisi mereka. - Mengidentifikasi dan memperuntukkan kepentingan pria dan wanita untuk jangka panjang.
----------	--

Model GAD tidak hanya memperhatikan perempuan, tetapi pada konstruksi sosial gender dan pemberian peran tertentu pada perempuan dan laki-laki. Lebih jauh model ini melihat perempuan lebih sebagai agen perubahan dari perubahan sosial dan bukan hanya sebagai penerima bantuan pembangunan yang pasif.⁴³

Pendekatan pemberdayaan memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam hal kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dibandingkan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dalam pendekatan pemberdayaan berpendapat bahwa perkembangan organisasi perempuan, yang mengarah pada mobilitas politik, peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat, merupakan syarat penting bagi perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan diperlukan keberpihakan dari pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan teori *Gender and Development*, dimana teori ini tidak hanya memfokuskan pada perempuan tetapi juga fokus terhadap keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Peran adanya lembaga atau organisasi serta keberpihakan dari laki-laki mampu membuat perempuan

⁴³Perempuan dan Pembangunan <https://www.google.co.id/amp/s/nidyasakura.wordpress.com/2013/12/15/perempuan-dan-pembangunan-wid-wad-gad> (diakses pada tanggal 08 Juli 2018 pukul 23.25 WIB).

meningkatkan kualitas hidupnya yang pada akhirnya dapat berpengaruh positif pada peningkatan ekonomi keluarga.

4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan

Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan mencakup:⁴⁴

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya;
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok;
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan.

B. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.⁴⁵

1. Tujuan SPP

⁴⁴ Lili Mrliyah, Model Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat agribisnis di kawasan bandungan, Majalah Ilmiah Edisi Khusus Dies Natalis Vol. Xx, No. 3. Agustus 2013, hlm. 26.

⁴⁵ Siti Hasanah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)", SAWWA-Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial skala dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan menciptakan lapangan kerja.

2. Ketentuan Dasar SPP

Ketentuan dasar kegiatan SPP adalah kemudahan, terlembagakan, keberdayaan, pengembangan, dan akuntabilitas. Kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Terlembagakan artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. Keberdayaan artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan artinya keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Akuntabilitas artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat

Dana BLM adalah dana yang disediakan oleh PNPM-MP untuk mendanai kegiatan usaha melalui proses perencanaan dengan ketentuan alokasi dana kegiatan SPP per kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM. Sasaran program SPP adalah RTM yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah

berjalan sekurang-kurangnya satu tahun, mempunyai kegiatan simpan pinjam dan dana pinjaman yang telah disepakati. Kemudian telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota, kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik, dan mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

4. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program, dengan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut:

a. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi

Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa yang berkumpul di kecamatan memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya.

b. Musyawarah Desa Sosialisasi

Dalam Musyawarah Desa (Musdes) sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

c. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan menyesuaikan ketentuan tersebut diatas termasuk kondisi anggota. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar RTM yang akan menjadi pemanfaat. Kemudian RTM yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat. Untuk hasil musyawarah dusun, dituangkan dalam Berita Acara.

d. Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi ditingkat desa. Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan

Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan ditingkat kecamatan.

e. Verifikasi

Verifikasi kegiatan SPP dibantu dengan formulir yang tersedia. Format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (*Capital Assets Management Earning Liquidity*) yaitu: penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas.

Proses pelaksanaan verifikasi kelompok SPP, mencakup penilaian dan verifikasi atas proposal yang diajukan kelompok-kelompok SPP yang berisi antara lain pengalaman kegiatan simpan pinjam, pemenuhan terhadap persyaratan sebagai kelompok, kondisi kegiatan simpan pinjam dengan penilaian permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan, pendapatan dan likuiditas (pendanaan jangka pendek), penilaian khusus rencana kegiatan, dan jumlah RTM sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar RTM. Dalam proses verifikasi juga perlu melakukan penilaian kategorisasi kelompok menjadi kelompok pemula, kelompok berkembang, dan kelompok siap/matang, sesuai kriteria program.

Pembuatan berita acara hasil verifikasi sebagai tahap akhir proses verifikasi usulan, mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan RTM sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok.⁴⁶

Verifikasi terhadap usulan kegiatan pinjaman paling tidak mencakup beberapa hal:

⁴⁶ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2007), hlm.58-61.

- Pengalaman usaha/kegiatan yang dilakukan oleh anggota atau kelompok (kegiatan/usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh anggota/kelompok simpan pinjam untuk kelompok SPP)
- Persyaratan anggota/kelompok pemanfaat/peminjam
- Untuk kegiatan Simpan Pinjam.⁴⁷

f. Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan modal prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori RTM. Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap tidak layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi.

Prioritas kebutuhan kelompok SPP mempertimbangkan keterlibatan RTM sebagai anggota dan pemanfaat, kategori tingkat perkembangan kelompok, hasil penilaian kelayakan kelompok pengurus yang dituangkan dalam BA Tim Verifikasi, dan pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah RTM dan peningkatan kesempatan kerja/usaha.

g. Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan

Pada tahapan ini diambil keputusan penentuan pendanaan usulan kelompo-kelompok yang memenuhi syarat pemeringkatan yang dapat didanai dengan dana BLM. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir, maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD perguliran.

h. Penetapan Persyaratan

⁴⁷ Alur Tahapan Pengelolaan Dana Bergulir, palitopiaman.blogspot.com/2014/02/alur-tahapan-pengelolaan-dana-bergulir (diakses pada tanggal 09 Juli 2019 pukul 22.14 WIB).

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan, jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok, dan penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.

i. Pencairan Dana

Pencairan dana BLM dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok yang disertai penandatanganan perjanjian pinjaman antara kelompok dan UPK. Pada saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK (2%) dan operasional desa (3%).

j. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK

Pengelolaan dokumen UPK mencakup beberapa hal yaitu pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, Pengelolaan Dokumen Proposal Penulisan Usulan dengan peta sosial, Pengelolaan dokumen penyaluran: kwitansi/SPPB.

Pengelolaan administrasi meliputi: Rekening Pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, Kartu Pinjaman.

Pengelolaan pelaporan meliputi: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman SPP, Laporan Kolektibilitas SPP, Neraca, Laporan Operasional.

k. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok

Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi: data-data peminjam, dokumen pendanaan/kwitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman pemanfaat.

l. Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi, maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan BA. Selain menetapkan daftar tunggu, juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

m. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup pelestarian kegiatan dan pengembangan kelompok. Pelestarian kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin, pelestarian prinsip PNPM-MPd terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi, penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok, pengembangan layanan kepada masyarakat, dan pengembangan permodalan.

n. Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerjasama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan

kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam Pengelolaan Dana Bergulir.⁴⁸

C. Landasan Teologis

Islam telah memposisikan perempuan di tempat mulia sesuai dengan kodratnya. Yusuf Qardhawi pernah mengatakan, “Perempuan memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat”. Jadi, mana mungkin keluarga dan masyarakat itu baik jika perempuannya tidak baik.⁴⁹ Dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 14, berbunyi;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سِنِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, Ibunya telah mengandung-nya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada Aku kembali.”*⁵⁰

Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Islam sendiri telah dicontohkan pada masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (Istri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan yang menekuni bidang tatarias pengantin, istri bdullah Ibn Mas’ud dan Qillat Umami Bani Anmar dikenal sebagai wiraswastwan yang sukses, al-Syifa yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah Umar Ibn al-Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah, dan lain-lain. Begitu aktifnya kaum perempuan pada masa Nabi, Aisyah pernah mengatakan: “Alat pemintal di tangan

⁴⁸Tim Kordinasi ..., hlm. 62-64.

⁴⁹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kotemporer Jus II*, alih bahasa As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hl m. 42.

⁵⁰Depag RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 413.

perempuan lebih baik daripada tombak di tangan kaum laki-laki”. Dalam suatu riwayat lain, Nabi pernah mengatakan: “Sebaik-baik permainan seorang Muslim di dalam rumahnya adalah memintal/menenun”.⁵¹

Islam menekankan kepada umatnya untuk bekerja. Sebagaimana dalam sabda-Nya bahwa “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan beribadahlah unruk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok”. Martoyo berpendapat manusia dalam aktivitas kebiasaannya memiliki semangat uuntuk mengerjakan sesuatu asalkan dapat menghasilkan sesuatu yang dianggap oleh dirinya memiliki suatu nilai yang sangat berharga, yang tujuannya jelas pasti untuk melangsungkan kehidupannya, rasa tentram, rasa aman dan sebagainya. Firman Allah SWT dalam QS. Az-Zumar: 39.⁵²

تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ عَمِلُ إِنِّي مَكَانَتِكُمْ عَلَى أَعْمَلُوايَقَوْمِ قُلِّ

“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sungguhnyaku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui,"(QS. Az-Zumar: 39. ”⁵³

Ayat diatas menyuruh dan memotivasi kita untuk bekerja. Dengan bekerja kita bukan hanya mendapat penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah. Seorang muslim harus bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Hendaknya para pekerja dapat meningkatkan tujuan akhir dari pekerjaan yang mereka lakukan, karena tujuan utama dari bekerja menurut Islam adalah memperoleh keridhaan Allah SWT.

Seorang mu'min hendaknya mengerjakan perbuatan atau amal sholeh dengan disertai iman. Adapun laki-laki dan perempuan mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan karunia itu. Tidak ada perbedaan antara keduanya pahala siapa yang lebih banyak atau berlimpah. Disini menunjukan

⁵¹Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 32.

⁵²Terjemah Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an surat Az-Zumar, hlm.462.

⁵³Terjemah Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an surat Az-Zumar, hlm.462.

bahwa perempuan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama pentingnya dengan laki-laki. Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin, sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin negaranya. Ini merupakan bukti bahwa perempuan pun bis memimpin di luar rumah, tapi tidak untuk di dalam rumah tangga. Lelaki adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya tanpa terkecuali.⁵⁴

Dalam memperoleh pekerjaan yang layak, pria dan wanita juga mempunyai hak yang sama. Tentu saja, hal itu disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Artinya, pekerjaan yang sifatnya kasar dan berat tentu bukan bidangnya wanita, karena secara fisik mereka tidak sekuat kaum pria. Jadi secara kodrati wanita dapat disertai pekerjaan yang ringan sesuai kemampuan mereka, namun tidak berarti haram mengerjakan pekerjaan yang berat dan kasar, perbedaan tersebut lebih mengacu pada fungsi wanita sebagai ibu rumah tanggadan perhiasan dalam kehidupan.⁵⁵ Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah, sehingga dikatakan bahwa harus memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya, dan masyarakatnya.

IAIN PURWOKERTO

⁵⁴Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Tafsir* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 53.

⁵⁵Nasrudin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: PUSTAKA PENERBIT, 1999), hlm. 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. Dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.⁵⁶

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.⁵⁷ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.⁵⁸ Pendekatan kualitatif dipandang cocok karena bersifat dan menghendaki keutuhan sesuai dengan permasalahan penelitian ini yaitu terkait dengan pemberdayaan perempuan melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

Menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁹ Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar dengan subyek dan latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa adanya dan catatan-catatan lapangan yang aktual.

⁵⁶Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosisal* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 12-13.

⁵⁷Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 1.

⁵⁸Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 8.

⁵⁹Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 140.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwojati termasuk salah satu Kecamatan yang melaksanakan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan banyak masyarakatnya yang mengandalkan dana pinjaman SPP untuk digunakan sebagai modal usaha kecil/usaha rumahan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan November 2017- Mei 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁰ Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat variabel penelitian melekat. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian.⁶¹ Subjek penelitian ini sangat penting, karena pada subjek inilah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti yaitu anggota kelompok penerima dana pinjaman SPP.

Sedangkan fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel disebut sebagai objek penelitian. Objek penelitian ditemukan melekat pada subjek penelitian.⁶² Objek dalam penelitian ini adalah pemberdayaan perempuan melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

D. Sumber Data

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, hlm. 200.

⁶² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian...*, hlm. 191.

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber data merupakan benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.⁶³ Penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui observasi, interview, kuisioner maupun dokumentasi atau gabungan keempatnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari anggota kelompok penerima dan pinjaman SPP dan UPK Kecamatan Purwojati selaku pengelola kegiatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

- a. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh kelompok penerima dana pinjaman SPP.
- b. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- c. Data-data lainnya yang diperoleh dari, BPS, Kecamatan, Desa dan Instansi lain yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁴

1. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Macam-macam

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, hlm. 116.

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta : 2014), hlm. 409.

observasi yaitu Observasi Partisipatif, Observasi Terus Terang atau Tersamar dan Observasi Tak Berstruktur.⁶⁵

Teknik observasi dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung yaitu data mengenai proses pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

2. Metode Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁶ Esterberg 2002 mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur.⁶⁷

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara terstruktur, karena informasi yang diperlukan peneliti sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrument pedoman wawancara tertulis berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Wawancara standar mempergunakan *schedule* wawancara yang telah dipersiapkan secara cermat untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data dari pengelola kegiatan SPP serta anggota penerima dana pinjaman SPP mengenai hal-hal yang terkait dengan gambaran umum dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

3. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

⁶⁵Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 406.

⁶⁶Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 410.

⁶⁷*Ibid...*, hlm. 412.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif.⁶⁸

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati, dan data-data lain terkait dengan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

4. Trianggulasi

Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Selanjutnya Mathinson mengemukakan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data trianggulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Diharapkan dengan trianggulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.⁶⁹

Mekanismenya adalah dengan cara membandingkan hasil data dari masing-masing subyek penelitian seperti Anggota UPK, Ketua kelompok SPP, dan Anggota penerima dana pinjaman SPP melalui pengumpulan data yang telah dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan dengan teknik ini penyusun memperoleh kevalidan atau kekuatan data terkait bagaimana pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

F. Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁰

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu analisa

⁶⁸*Ibid...*, hlm. 422.

⁶⁹Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 423.

⁷⁰*Ibid...*, hlm.427.

yang digambarkan dengan kata-kata untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Adapun metode deskriptif adalah suatu analisa yang memberikan gambaran dan melaporkan apa adanya dengan proses analisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian⁷¹ Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Data yang peneliti gunakan akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam tiga tahap menurut Miles & Huberman, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷²

⁷¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 115.

⁷²Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 431- 438.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Purwojati

a. Demografi

Jumlah penduduk di Kecamatan Purwojati pada tahun 2017 yaitu 31.893 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 842.39 jiwa per km².

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kecamatan Purwojati Menurut Desa⁷³

No.	Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Gerduren	507.52
2	Karangtalun Kidul	539.80
3	Kaliurip	200.80
4	Karangtalun Lor	167.05
5	Purwojati	478.81
6	Klapasawit	171.50
7	Karangmangu	472.45
8	Kaliputih	354.90
9	Kaliwangi	462.17
10	Kalitapen	431.09
Total		3,786.09

b. Letak Geografis

Purwojati adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis luas wilayah Kecamatan Purwojati yaitu 3.786,09 Ha/37,86 Km² dan tinggi Ibu Kota Kecamatan dari permukaan air laut yaitu 20m.

Batas-batas Kecamatan Purwojati:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cilongok
- Sebelah Selatan: Kecamatan Jatilawang
- Sebelah Timur : Kecamatan Rawalo

⁷³Dokumentasi Kecamatan Purwojati Dalam Angka 2017, BPS Kabupaten Banyumas

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Purwojati mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah sebanyak 12.048 ribu jiwa dan masyarakat purwojati juga banyak yang bekerja di bidang industri serta perdagangan.

2. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.⁷⁶ Dengan adanya pemberian akses permodalan yang mudah diharapkan perempuan dengan golongan ekonomi lemah mampu mengembangkan usaha mikro.

Kecamatan Purwojati adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Karena bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Purwojati hanya mengandalkan lahan sawah sebagai kegiatan dan sumber dasar kehidupan sehari-harinya. Apabila sawah yang menjadi andalan utama tersebut tidak mampu menghasilkan apa yang dituju oleh masyarakat, maka kehidupan perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan akan terganggu.

Menurut salah satu anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Kecamatan Purwojati, dengan adanya kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati, dinilai dapat memberikan bantuan secara ekonomi bagi masyarakatnya, dengan adanya pemberian bantuan modal bagi perempuan, kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan.

⁷⁶Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2007), hlm.58.

Kegiatan SPP mulai dilaksanakan di kecamatan Purwojati pada tahun 2009 bersamaan dengan masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) karena kegiatan SPP sendiri merupakan salah satu kegiatan yang ada di dalam program PNPM-MPd. Program PNPM-MPd merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh karena itu ketika masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir Program PNPM-MPd pun dinyatakan berakhir pada Desember 2014, namun meskipun program PNPM-MPd telah berakhir kegiatan SPP masih tetap dilanjutkan hingga sekarang karena dinilai berhasil dalam mengembangkan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi.

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu bentuk kegiatan dana bergulir yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan ketentuan anggota khusus perempuan dan prioritas kelompok yang memiliki anggota Rumah Tangga Miskin (RTM). Program SPP merupakan bentuk pinjaman tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng. Mekanisme perguliran dana yang dimaksud yaitu dana pembayaran angsuran pinjaman yang diterima pihak UPK dari tiap anggota akan dipinjamkan kembali atau digulirkan pada kelompok lain yang mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, apabila ada kelompok yang menunggak, maka akan terhambat pula penyaluran pinjaman pada kelompok lain yang membutuhkan.⁷⁷ Ketentuan mengenai pendanaan dalam kegiatan dana bergulir SPP mengacu pada aturan perguliran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK yang telah disepakati yaitu, dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP, tidak diperkenankan memberikan pinjaman secara individu, adanya perjanjian pinjaman antara pihak UPK dengan kelompok pemanfaat, jangka waktu pinjaman SPP yaitu selama 1 tahun atau 12 bulan dengan sistem atau jadwal pembayaran angsuran tiap bulan dan tanggal jatuh tempo tiap kelompok disesuaikan dengan tanggal saat pencairan dana, dan ketentuan yang terakhir

⁷⁷Wawancara dengan Ibu Endang anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 11.15 WIB.

adalah besarnya beban jasa pinjaman atau suku bunga pinjaman SPP yaitu 20%.

a. Struktur kelembagaan dan nama-nama pengurus kelembagaan

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD):

- H. Moch. Imam Siswan
- Surtini, M.Pd
- Kitam Sumardi

Badan Pengurus (BP) UPK:

- H. Nardi
- Drs. Sukamto

Tim Verifikasi:

- H. Kasum Junaedi
- H. Jakum
- Darwo

Unit Pengelola Kegiatan (SPP) UPK:

Ketua : Baryono
 Bendahara : Titi Mulyaningsih
 Sekretaris : Endang Sukowati
 Staff : Darno⁷⁸

b. Mekanisme pelaksanaan SPP di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

Mekanisme untuk dapat memperoleh pinjaman dari program SPP yaitu dengan cara membentuk kelompok terlebih dahulu dengan jumlah anggota tidak boleh lebih dari 20 orang. Pembentukan kelompok dilakukan sendiri bukan oleh pihak UPK dengan penentuan ketua kelompok dipilih langsung oleh anggota melalui musyawarah.

⁷⁸Dokumentasi UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 20 Maret 2018

Mekanisme pengajuan pinjaman SPP dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman dengan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Pembuatan proposal pengajuan oleh ketua kelompok sebagai salah satu persyaratan yang berisi identitas tiap anggota, jenis usaha yang dijalankan dan besarnya pengajuan pinjaman.
2. Menyertakan proposal pada pihak UPK SPP dengan disertai persyaratan lain yaitu fotocopy KTP dan KK dari tiap anggota.
3. Mengisi formulir atau disebut sebagai surat pengakuan utang untuk tiap anggota dan surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng sebagai persyaratan pengajuan.

Setelah melaksanakan tahapan pengajuan pinjaman tersebut, maka akan dilakukan survey lapangan oleh tim verifikasi dari UPK SPP untuk pengajuan pinjaman yang pertama mengenai kelayakan memperoleh bantuan pinjaman dana bergulir dan kesesuaian antara jenis usaha yang dijalankan dengan besarnya pengajuan pinjaman. Kemudian setelah dinyatakan layak maka selanjutnya menunggu pengesahan dari Kepala Kecamatan dan setelah disahkan maka akan dilaksanakan pencirnan dana SPP.

c. Ketentuan dan Pelaksanaan Pencairan Dana

Besarnya dana pinjaman yang diterima oleh tiap anggota pada saat pencairan terkadang tidak sesuai dengan nilai pengajuan, hal ini dikarenakan untuk anggota yang baru pertama kali mengajukan pinjaman SPP disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan dan kesanggupan pembayaran yang dilihat dari hasil survei lapangan oleh tim verifikasi. Adapun untuk anggota yang sudah mengajukan kembali, besarnya pinjaman yang diperoleh didasarkan pada kondisi pinjaman sebelumnya. Apabila pada periode sebelumnya terdapat tunggakan, maka anggota dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya. Akan tetapi apabila pada periode

sebelumnya terdapat tunggakan maka besarnya pinjaman yang diterima akan lebih kecil dari pinjaman sebelumnya.

Pada awal pencairan dana, jumlah dana yang diterima akan dipotong 5% dengan ketentuan 1% untuk administrasi, dan 4% untuk dana simpanan. Simpanan sebesar 4% ini dalam prosedur SPP disebut sebagai simpanan tanggung renteng.

d. Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng SPP

Sistem tanggung renteng dalam pelaksanaan SPP merupakan penanggungan secara bersama dalam upaya menghindari pinjaman macet yaitu berupa simpanan yang disebut sebagai simpanan tanggung renteng yang berasal dari tiap anggota. Simpanan tanggung renteng ini berfungsi untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan pada saat pembayaran angsuran saat jatuh tempo sehingga bias ditanggulangi terlebih dahulu dari simpanan tanggung renteng tersebut. Adanya simpanan ini bertujuan untuk mengantisipasi atau menghindari pembayaran macet dari satu anggota yang akan berdampak buruk pada semua anggota atau satu kelompok. Ini dikarenakan apabila tidak ditanggulangi terlebih dahulu maka satu kelompok yang akan menanggung akibatnya. Hal ini juga disebut sebagai tanggung renteng, karena ulah dari satu anggota akibatnya akan ditanggung bersama. Akibat yang ditanggung yakni untuk pengajuan pinjaman kembali harus meunggu anggota yang macet untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu, sehingga akan menghambat anggota lain dalam pengajuan pinjaman tahap berikutnya.

e. Sanksi Tunggakan Pembayaran Pinjaman

Bentuk sanksi yang diberikan pada anggota yang menunggak pembayaran pinjaman yaitu apabila pada tahap berikutnya mengajukan pinjaman kembali maka besarnya pinjaman akan lebih kecil dari pinjaman sebelumnya. Akan tetapi, apabila anggota tersebut sering menunggak pembayaran maka tidak akan diberikan pinjaman kembali

oleh pihak UPK SPP pada periode berikutnya. Hal ini karena menyebabkan dana menjadi terhambat untuk digulirkan kembali.⁷⁹

B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

1. Konsep Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

Program pemberdayaan ditujukan agar masyarakat lebih berdaya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan dan pengentasan kemiskinan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dinilai lebih efektif karena masyarakat dianggap lebih memahami permasalahan dalam wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endang selaku sekretaris UPK SPP Kecamatan Purwojati menuturkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses dimana perempuan lebih mampu mandiri, lepas dari ketergantungan, tidak menjadi kaum yang lemah, artinya perempuan memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam ekonomi keluarga. Pada intinya pemberdayaan adalah membantu masyarakat dalam hal ini khususnya kaum perempuan untuk lebih berdaya, mampu menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait diri mereka sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati merupakan kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Oos M. Anwas, yaitu:

- o. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat dan

⁷⁹Wawancara dengan Bpk. Baryono selaku ketua UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 11.20 WIB

potensi yang berbeda. Unsur-unsur paksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.

- p. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhan yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang memiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup. Aspek kebutuhan, masalah dan potensi tidak nampak. Agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien/sasaran.
- q. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subyek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- r. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai-nilai, budaya dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong-royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
- s. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
- t. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah bertahan lama.

- u. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistic terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- v. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- w. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning/education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik dan juga lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
- x. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keberagaman budaya oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- y. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
- z. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut mulai dari, mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.
- aa. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.

bb. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi dan kemampuannya.

Kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberdayaan perempuan dengan sasaran pemberdayaannya adalah menumbuhkan jiwa wirausaha kepada kaum perempuan. Di Kecamatan Purwojati dengan adanya pemberdayaan melalui kegiatan SPP telah mampu mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Dengan adanya pemberian dana pinjaman untuk perempuan diharapkan perempuan lebih produktif dan memiliki peran seraca ekonomi dalam rumah tangga.

Pemahaman konsep ini dirasa penting karena dalam proses pemberdayaan akan berjalan dengan baik apabila pembuat kebijakan dan sasaran saling mampu untuk memahami konsep dari pemberdayaan itu sendiri.

2. Program Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

Kegiatan SPP memberikan kemudahan kepada masyarakat, dengan adanya bantuan modal terhadap usaha masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Melalui kegiatan SPP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian dana bergulir yang melibatkan masyarakat yaitu dari kaum perempuan agar lebih meningkatkan kemandirian terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sasaran utama kegiatan SPP lebih dapat produktif dan dikembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa anggota kelompok penerima dana pinjaman SPP salah satunya yaitu Ibu

Siti Lestari beliau menuturkan bahwa sebelum adanya pinjaman SPP usaha masyarakat hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Setelah adanya SPP, masyarakat sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dan pengembangan usaha yang mereka jalani. Mereka juga berharap agar kegiatan simpan pinjam seperti ini tetap berlanjut sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang produktif.⁸⁰

Dalam observasi yang penulis lakukan, peran pengelola dalam pengelolaan dana SPP sangatlah penting, karena tanpa adanya pengelola kegiatan SPP ini tidak akan berjalan lancar. Adapaun peran pengelola antara lain⁸¹:

- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana SPP yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif.
- b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi, baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan SPP.
- c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen SPP.
- d. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- e. Melakukan sosialisasi dalam perencanaan peminjaman dan pengembalian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan peminjaman, pengembangan program dan informasi lainnya kepada pihak yang membutuhkan.

Tabel 8
Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Lestari⁸²

No.	Nama	Jenis Usaha	Besar Pinjaman
1	Carsini	Dagang	Rp. 15.000.000
2	Kuntari	Dagang	Rp. 12.000.000

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Siti Lestari anggota kelompok penerima dana pinjaman SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 7 Desember 2017, pukul 10.15 WIB

⁸¹Wawancara dengan Ibu Endang selaku sekretaris UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.45 WIB

⁸²Dokumentasi data UPK SPP Kecamatan Purwojati pada tanggal 20 Maret 2018

3	Sutrimah	Dagang	Rp. 12.000.000
4	Rasilem	Tani	Rp. 12.000.000
5	Ratem	Tani	Rp. 3.000.000
6	Rukiyah	Dagang	Rp. 12.000.000
7	Siti Lestari	Dagang	Rp. 7.000.000
8	Margini	Tani	Rp. 6.000.000
9	Juwariyah	Dagang	Rp. 6.000.000
10	Nasichah	Dagang	Rp. 6.000.000
11	Sulyati	Dagang	Rp. 10.000.000
12	Ade Iryani	Dagang	Rp. 6.000.000
13	Nita Bunga Tiana	Dagang	Rp. 2.000.000
14	Risa Jayanti	Dagang	Rp. 2.000.000
Total			Rp. 111.000.000

Tabel 9
Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Asih Lestari⁸³

No.	Nama	Jenis Usaha	Besar Pinjaman
1	Tiwen	Dagang	Rp. 2.000.000
2	Karisem	Tani	Rp. 7.000.000
3	Artem	Tani	Rp. 7.000.000
4	Sopiah	Tani	Rp. 7.000.000
5	Widiyati	Tani	Rp. 7.000.000
6	Kafiah Harini	Wiraswasta	Rp. 7.000.000
7	Siti Muanisah	Dagang	Rp. 8.000.000
8	Satinah	Tani	Rp. 6.000.000
9	Susilowati	Tani	Rp. 12.000.000
10	Rasiah	Tani	Rp. 15.000.000
11	Disah	Dagang	Rp. 15.000.000
12	Aminah	Wiraswasta	Rp. 15.000.000
13	Ratimah	Dagang	Rp. 15.000.000
14	Eti Sunarti	Tani	Rp. 15.000.000
15	Rasiyem	Tani	Rp. 15.000.000
16	Wiwityaningsih	Wiraswasta	Rp. 15.000.000
17	Watini	Tani	Rp. 15.000.000

⁸³ Dokumentasi data UPK SPP Kecamatan Purwojati pada tanggal 20 Maret 2018

18	Khotimah	Tani	Rp. 3.000.000
19	Usniyawati	Wiraswasta	Rp. 15.000.000
20	Caritem	Tani	Rp. 4.000.000
21	Napsiyah	Tani	Rp. 7.000.000
22	Sunah	Tani	Rp. 3.000.000
23	Aisyi Rahmah	Tani	Rp. 3.000.000
Total			Rp. 221.000.000

Tabel 10
Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Sembada⁸⁴

No.	Nama	Jenis Usaha	Besar Pinjaman
1	Purwati	Dagang	Rp. 10.000.000
2	Watini	Dagang	Rp. 8.000.000
3	Wasikem	Dagang	Rp. 10.000.000
4	Karsitem	Tani	Rp. 8.000.000
5	Dasini	Dagang	Rp. 8.000.000
6	Warsini	Tani	Rp. 8.000.000
7	Suriah	Dagang	Rp. 4.000.000
8	Dasiwen	Dagang	Rp. 6.000.000
9	Salamah	Dagang	Rp. 3.000.000
Total			Rp. 65.000.000

Tabel 11
Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Ngudi Sejahtera⁸⁵

No.	Nama	Jenis Usaha	Besar Pinjaman
1	Sumiati	Dagang	Rp. 15.000.000
2	Rasiyah	Dagang	Rp. 13.000.000
3	Tasitem	Dagang	Rp. 15.000.000
4	Sukirah	Dagang	Rp. 5.000.000
5	Khayati	Dagang	Rp. 10.000.000
6	Khosidah	Dagang	Rp. 15.000.000
7	Tasilem	Dagang	Rp. 13.000.000
8	Caryati	Dagang	Rp. 4.000.000
9	Daryati	Dagang	Rp. 4.000.000
10	Rasiti	Dagang	Rp. 10.000.000
11	Sartiwen	Dagang	Rp. 10.000.000

⁸⁴ Dokumentasi data UPK SPP Kecamatan Purwojati pada tanggal 20 Maret 2018

⁸⁵ Dokumentasi data UPK SPP Kecamatan Purwojati pada tanggal 20 Maret 2018

12	Warsinah	Dagang	Rp. 3.000.000
Total			Rp. 117.000.000

Tabel 12

Daftar Penerima Manfaat Kegiatan SPP Kelompok Maju Makmur⁸⁶

No.	Nama	Jenis Usaha	Besar Pinjaman
1	Darinah	Dagang	Rp. 15.000.000
2	Watimah	Tani	Rp. 15.000.000
3	Muryani	Dagang	Rp. 13.000.000
4	Jariyah	Dagang	Rp. 10.000.000
5	Darni	Dagang	Rp. 3.000.000
6	Ismiatun	Tani	Rp. 3.000.000
7	Jumrah	Dagang	Rp. 5.000.000
8	Kusmini	Dagang	Rp. 3.000.000
9	Fatonah	Tani	Rp. 3.000.000
10	Sukinah	Dagang	Rp. 5.000.000
11	Maryatun	Dagang	Rp. 5.000.000
12	Darti	Dagang	Rp. 3.000.000
13	Sawen	Dagang	Rp. 2.000.000
14	Casem	Dagang	Rp. 2.000.000
15	Tarkem	Dagang	Rp. 2.000.000
16	Dewi Ratnawati	Dagang	Rp. 12.000.000
Total			Rp. 101.000.000

Berdasarkan data sampel tabel di atas, dapat diketahui bahwa pemberian dana kepada masing-masing kelompok disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pengajuan pinjaman per anggota. Adapun pengajuan pinjaman tidak boleh melebihi batas maksimum dari jumlah pinjaman yang dialokasikan. Dan dari data di atas juga dapat disimpulkan bahwa kelompok

⁸⁶ Dokumentasi data UPK SPP Kecamatan Purwojati pada tanggal 20 Maret 2018

SPP yang ada di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas jenis usaha mereka mayoritas sama yaitu tani dan berdagang.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Endang selaku sekretaris pengelola UPK SPP, beliau menuturkan bahwa kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Pemberian dana pinjaman SPP ini memberikan banyak manfaat bagi penerima pinjaman yang ada di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Ini dikarenakan syarat yang perlu dipenuhi tidak serumit yang diajukan oleh bank.⁸⁷ Menurut penuturan anggota kelompok penerima dana pinjaman SPP yaitu Ibu Juwariyah dalam peminjaman modal sangat dimudahkan karena proses pengajuan persyaratan mudah bagi kelompok, tidak diperlukan banyak persyaratan, syaratnya hanya fotocopy KTP dan KK tidak memerlukan syarat-syarat layaknya pengajuan ke bank seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha dan lain-lain. Dalam peminjaman dana SPP tidak memberikan jaminan kepada UPK seperti pada bank, tetapi dengan memberikan jaminan kepada kelompok yang dipegang oleh ketua kelompok yang disebut sebagai tanggung renteng.⁸⁸ Kesepakatan kelompok dalam tanggung renteng menjadi kekuatan bagi UPK berjalan baik dalam pelaksanaannya, jika ada anggota yang tidak bias membayar pengembalian kredit pinjaman tepat waktu bias dibantu sesama anggota untuk menalangi pengembalian kredit. Berjalannya tanggung renteng menjadikan pengembalian kredit lancar sehingga bias mengurangi resiko tunggakan yang bias membuat terhambatnya proses perguliran dana.

Selain kemudahan dalam proses peminjaman adanya kegiatan SPP juga memberikan manfaat yang besar seperti yang dikemukakan oleh Ibu Satiwen selaku ketua kelompok Sembada yang memiliki usaha warung beliau merasakan manfaat dana SPP bagi usahanya dalam meningkatkan

⁸⁷Wawancara dengan Ibu Endang anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.45 WIB

⁸⁸Wawancara dengan Ibu Margini anggota kelompok penerima dana pinjaman SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 4 Januari 2018, pukul 15.40 WIB

keuntungan usaha, karena bantuan tambahan modal menjadikan usaha warungnya semakin berkembang.

Mayoritas anggota penerima dana pinjaman dengan jumlah kecil memanfaatkan dana pinjaman sebagai modal usaha kecil. Seperti Ibu Risa Jayanti dengan besar pinjamannya Rp. 2.000.000 beliau memanfaatkan untuk membuka usaha kosmetik online,⁸⁹ dan Ibu Satinah dengan jumlah pinjaman RP. 6.000.000 membuka usaha warung makanan.⁹⁰ Namun ada juga beberapa anggota yang memanfaatkan dana pinjaman untuk tambahan modal besar seperti yang dilakukan oleh Ibu Usniawati pemilik usaha kayu dan Ibu Aminah pemilik usaha mobil mesin potong kayu dengan jumlah pinjaman masing-masing Rp. 15.000.000.⁹¹

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kebijakan dalam suatu program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi masyarakat khususnya kaum perempuan sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan permodalan kecil yang mudah. Dalam proses pemberdayaan masyarakat dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak khususnya pemerintah dan masyarakat yang mengelola. Dengan kerjasama tersebut maka pelaksanaan program ini akan terlaksana dengan baik, lancar, dan tepat sasaran yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Adanya kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati bertujuan untuk membantu masyarakat agar keluar dari angka kemiskinan. Sumber kemiskinan merupakan tidak berdaya dan tidak mempunya masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar karena terbatasnya sarana dan prasarana sosial ekonomi serta rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal bagi masyarakat. Kurangnya dana untuk permodalan usaha akan menghambat perkembangan usaha yang telah dilakukan, sehingga

⁸⁹Wawancara dengan Ibu Risa anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 3 Januari 2018, pukul 14.00 WIB

⁹⁰Wawancara dengan Ibu Satinah anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 3 Januari 2018, pukul 16.10 WIB

⁹¹Wawancara dengan Ibu Usniawati dan Ibu Aminah anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 4 Januari 2018, pukul 09.00 WIB

mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Akibatnya bila tidak segera di atasi akan terjadi keterpurukan ekonomi dan mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat.

Dalam penjelasan petunjuk teknis operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, ketentuan menjadi kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan serta saling mengenal antar anggota.⁹²Sasaran dari pemanfaat kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati sudah efektif karena semua kelompok peminjam SPP semuanya berjenis kelamin perempuan serta mengenali anggotanya dengan baik sehingga lebih memudahkan anggota kelompok dalam komunikasi. Dalam pengembalian memudahkan ketua kelompok mengumpulkan angsuran dari tiap-tiap anggota karena ketua kelompok telah memahami bagaimana situasi dan kondisi anggota kelompok.

Tujuan kegiatan SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.⁹³ Tujuan kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati sudah tercapai karena berdasarkan hasil wawancara penerima dana pinjaman SPP mendapatkan pendanaan dengan mudah untuk membantu mengembangkan usaha mereka, dengan adanya kegiatan SPP juga memberikan peluang kesempatan kerja bagi perempuan karena mereka mencoba untuk membuka usaha baru dari dana pinjaman SPP.

3. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

⁹²Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2007), hlm. 59

⁹³Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional*, ...hlm. 58

Sebelum adanya pemberdayaan, mayoritas perempuan di Kecamatan Purwojati tidak bekerja, mereka hanya mengandalkan pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melalui kegiatan SPP ini mereka diberikan bantuan modal untuk membuka usaha agar kaum perempuan lebih produktif dan mampu membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Dengan memanfaatkan kekuatan dan posisi menjadi solusi untuk mendapatkan apa yang diinginkan agar mereka mendapat akses terhadap sumber ekonomi. Melalui kegiatan SPP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian dana pinjaman bergulir yang melibatkan masyarakat yaitu dari kaum perempuan agar lebih meningkatkan kemandirian terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sasaran utama kegiatan SPP lebih dapat produktif dan dikembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.⁹⁴

Dilihat dari pendekatan pemberdayaan menggunakan model GAD (*Gender and Development*) yang merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan seperti kerja produktif, reproduktif, privat dan publik, dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan, mempertahankan keluarga dan rumah tangga.⁹⁵ Penulis menyimpulkan pemberdayaan melalui kegiatan SPP memungkinkan kaum perempuan mengalami kesetaraan, mereka tidak takut untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, tanpa mengurangi posisi dan peranannya sebagai suami.

Selain ketrampilan berbisnis, kegiatan SPP membantu perempuan untuk berkembang dari segi pemikiran melalui arahan dan pemahaman serta

⁹⁴Wawancara dengan Ibu Endang anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.45 WIB

⁹⁵Julia Cleves Moss, *Gender dan Pembangunan*, Alih bahasa : Hatian Silawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 209.

pendampingan yang dilakukan oleh pihak UPK SPP. Banyaknya manfaat dan kemajuan yang diterima perempuan dari program pemberdayaan menjadikan kaum perempuan lebih berkembang dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan.

4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

Untuk mengetahui tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui indikator keberdayaan yang menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Sebuah program pemberdayaan sosial diberikan agar seluruh upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. Indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Purwojati adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipan aktif, agar tidak sekedar menjadi obyek pembangunan.
- b. Meningkatnya kaum perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- c. Meningkatnya kemampuan kaum perempuan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
- d. Meningkatnya peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.⁹⁶

Kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberian modal bagi kaum perempuan yang diperuntukan untuk membuka usaha, namun dalam prakteknya tidak semua anggota kelompok penerima dana pinjaman SPP

⁹⁶Wawancara dengan Ibu Endang anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.45 WIB

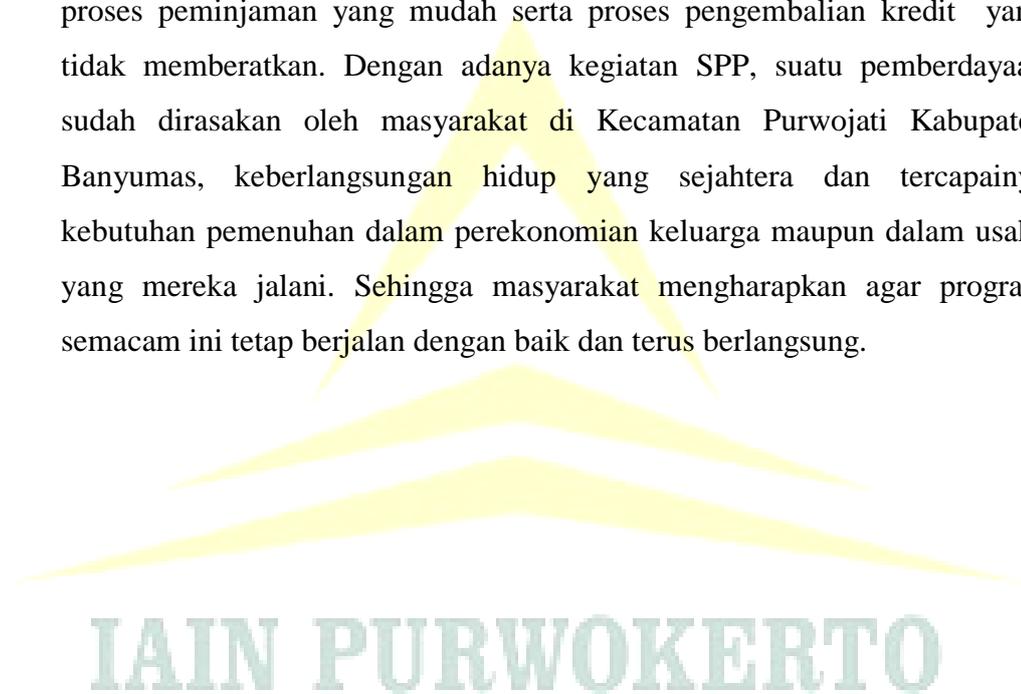
memanfaatkan dana pinjaman sebagaimana mestinya, ada beberapa anggota yang memanfaatkan dana pinjaman untuk konsumtif, seperti penuturan beberapa anggota kelompok penerima dana pinjaman salah satunya Ibu Margini, beliau memanfaatkan dana pinjaman untuk keperluan anak sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari,⁹⁷ permasalahan tersebut juga dirasakan oleh anggota UPK selaku pengelola kegiatan, namun menurutnya hal tersebut masih dimaklumi karena memang keterbatasan pengawasan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur kegiatan, dan hal tersebut dirasa tidak masalah selama anggota lancar dalam proses pengembalian kredit pinjaman.

Berdasarkan observasi penulis saat melakukan wawancara, selain permasalahan pemanfaatan dana oleh anggota kelompok masalah lain yang juga muncul yaitu pemberdayaan ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM) belum dijalankan dengan maksimal, sasaran SPP seharusnya diprioritaskan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM), namun kenyataannya banyak pemanfaat dana SPP dari kalangan *non*-RTM. Idealnya pemberdayaan ekonomi RTM-lah yang menjadi fokus dalam arti proses pemberdayaan sesuai tujuan kegiatan SPP, meskipun tidak memberikan pengaruh dalam proses perguliran dana tetapi sesungguhnya fokus kegiatan dan program pemberdayaan melalui kegiatan SPP artinya belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Oleh sebab itu, setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak yaitu pemerintah sebagai penyedia dana dan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran. Meskipun dalam proses pemberdayaan perempuan melalui kegiatan SPP di Kecamatan Puwojati Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan maksimal dengan adanya

⁹⁷Wawancara dengan Ibu Margini anggota kelompok penerima dana pinjaman SPP Kecamatan Purwojati, pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.45 WIB

berapa masalah yang muncul pada saat proses kegiatan, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota UPK SPP Kecamatan Purwojati, masuknya SPP di Kecamatan Purwojati mendapat respon yang sangat baik dari masyarakatnya, dengan banyaknya masyarakat yang tertarik turut serta dalam kegiatan SPP, dan pada dasarnya kegiatan SPP ini secara umum memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perempuan di Kecamatan Purwojati Kabupaten banyumas karena dengan adanya pinjaman dana SPP meskipun dalam proses pemanfaatannya digunakan untuk usaha ataupun untuk konsumtif masyarakat sudah merasa dimudahkan dengan proses peminjaman yang mudah serta proses pengembalian kredit yang tidak memberatkan. Dengan adanya kegiatan SPP, suatu pemberdayaan sudah dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, keberlangsungan hidup yang sejahtera dan tercapainya kebutuhan pemenuhan dalam perekonomian keluarga maupun dalam usaha yang mereka jalani. Sehingga masyarakat mengharapkan agar program semacam ini tetap berjalan dengan baik dan terus berlangsung.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan pembahasan yang telah dilakukan tentang pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas dapat membantu masyarakat khususnya kaum perempuan dalam hal permodalan usaha, meskipun banyak masalah yang muncul karena pemanfaatan dana yang tidak sesuai prosedur seperti dana pinjaman yang digunakan anggota penerima dana untuk dimanfaatkan secara konsumtif, yaitu untuk pembayaran sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari, serta sasaran kegiatan yang belum maksimal, karena masih ada *non-RTM* yang ikut serta dalam proses peminjaman dana SPP. Meskipun muncul beberapa masalah dalam berjalannya kegiatan namun dengan adanya kegiatan SPP, suatu pemberdayaan sudah dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, keberlangsungan hidup yang sejahtera dan tercapainya kebutuhan pemenuhan dalam perekonomian keluarga maupun dalam usaha yang mereka jalani. Sehingga masyarakat mengharapkan agar program semacam ini tetap berjalan dengan baik dan terus berlangsung.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa terhadap kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang berjalan di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, ada beberapa saran yang penulis sampaikan diantaranya adalah:

1. Harus adanya kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh UPK SPP selaku pengelola kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam penggunaan dana pinjaman oleh masyarakat.

2. Semua pelaku kegiatan berkomitmen untuk lebih meningkatkan sasaran kepada RTM. Melakukan proses-proses pemberdayaan sesuai dengan kondisi RTM agar lebih terlihat hasil dan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anwas, Oos. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baidan, Nasrudin. *Tafsir bi A-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: PUSTAKA PENERBIT, 1999.
- Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 1993.
- Cleves Moss, Julia. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Depag RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Freyer Stowasser, Barbara. *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Tafsir*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Maarif, Syafi'i. *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Press, 2003.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Masykur, Imam Ghazali, dkk. *Al-Qur'an*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengurus-Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Prijono, S. Onny dan Pranaka. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jus II*, alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

- Rukminto, Isbandi. *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Sochimim. *Kewirausahaan Teori Aplikatif dan Praktik*. Yogyakarta: Cinta Buku, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Theresia, Aprilia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta, 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

NON BUKU:

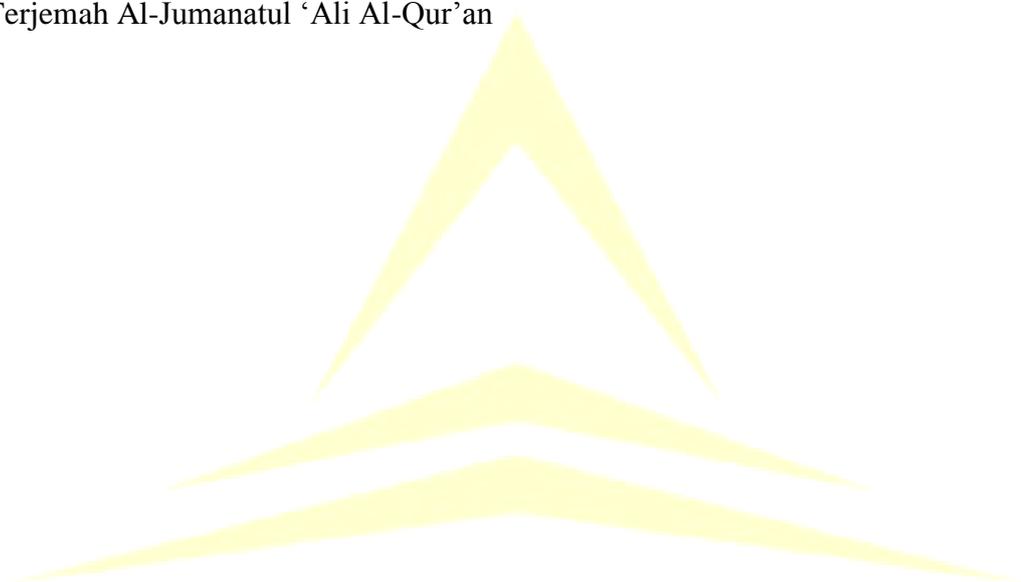
- Nihayah, Ana Zahrotun. *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reducation Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Economic : Journal Ekonomi dan Hukum Islam), vol.5.No. 2, 2015.
- Jumlah Penduduk Miskin Naik, Program Pemerintah Harus Dievaluasi <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/164100926/jumlah-penduduk-miskin-naik-program-pemerintah-harus-dievaluasi> (diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 21.00 WIB).
- Radar Banyumas “Peringkat 28 Jumlah Penduduk Miskin di Jateng”, <http://radarbanyumas.co.id> (diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 21.55 WIB).

Hasanah,Siti. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*. SAWWA-Volume 9, Nomor 1, 2013.

Rantung,Gianina Amelinda.*Efektifitas Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Ekonomi, 2014.

Supeni,Retno Endah. *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi deskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)*.Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS, 2011.

Terjemah Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an



IAIN PURWOKERTO